

Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Syaza Furqana^{1*}, Dian Fitria Handayani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: syazafurqana@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of budget planning and bureaucratic environment on budget absorption in the government of Tanah Datar Regency. The population of this research are 24 regional work units in Tanah Datar Regency. The respondents are the head of the office, finance department, asset department and expenditure treasurer. This research used primary data that used questionnaires distributed directly to 96 respondents. The results of this research indicate that 1) budget planning has positive effect on budget absorption in regional work unit in Tanah Datar Regency 2) budget planning has positive effect on budget absorption in regional work unit in Tanah Datar Regency. The contribution of the independent variable in explaining the dependent variable in the amount of 53,5%, while the remaining 56,5% explained by other variables outside the model.

Keywords: Budget Planning; Bureaucratic Environment; Budget Absorption.

How to cite (APA 6th style)

Furqana, Syaza & Handayani, D.F. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (3), 513-529.

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan rencana dalam bentuk tertulis yang disusun berdasarkan program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang dan barang. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan yang mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah dan memiliki fungsi sebagai alat pengendalian yang mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif agar siap dibelanjakan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan rumah tangganya sendiri dengan adanya sedikit campur tangan pemerintah pusat (Angrina, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan (Anfujatin, 2016). Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi topik utama yang sering dibahas oleh pengamat ekonomi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan

strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal mencapai target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (BPKP, 2011).

Di Indonesia, penyerapan anggaran yang lambat selalu menjadi masalah berulang yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja berdampak kepada lambatnya realisasi program dan kegiatan yang ada di pemerintahan. Selain itu, penyerapan anggaran pemerintah cenderung rendah di awal dan menumpuk pada akhir periode sehingga menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni, 2018). Rendahnya penyerapan anggaran juga terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat, dari data realisasi APBD semester pertama tahun 2019 hingga bulan Juli menunjukkan bahwa realisasi fisik target yang harus dicapai adalah 70,73% namun realitanya realisasi tersebut hanya mencapai 46,11%, sedangkan untuk realisasi keuangan hanya mencapai 40,73% dari target yang harus dicapai yakni 66,92%. Menanggapi hal tersebut, Rusdi Lubis selaku pengamat pemerintahan mengatakan bahwa rendahnya serapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi pada semester pertama 2019 dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu banyaknya OPD yang masih bergelut pada proses tender yang masih berjalan dan OPD yang kurang giat dan cepat dalam bekerja (Lubis, 2019). Penyerapan anggaran di Kabupaten Tanah Datar yang masih menunjukkan pola *hurry up spending* atau santai di awal, kebut di belakang, dimana dibuktikan dengan realisasi anggaran pada trimester pertama yang hanya mencapai 6% yang dikarenakan masalah pada perencanaan dan birokrasi, hal ini menunjukkan bahwa daya serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada waktu tersebut belum maksimal.

Penyerapan anggaran yang belum maksimal diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19. Pemerintah mengambil tindakan berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 yang secara garis besar berisi tentang *refocusing* anggaran, realokasi anggaran, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus ini. Hal ini akan mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran terutama pada belanja untuk pegawai, belanja untuk barang operasional dan non operasional dan belanja yang menimbulkan modal. Situasi pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan revisi penghematan yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan. Sebagian besar Kementerian Negara/ Lembaga telah memangkas anggaran belanja terutama untuk belanja barang dan belanja modal yang berakibat pada porsi belanja di semester pertama tahun 2020 jika dibandingkan semester kedua tahun 2019. Pagu belanja barang tahun 2020 hanya sebesar 73% dan pagu belanja modal hanya 54% saja. Realisasi belanja semester I tahun 2020 turun secara signifikan sebesar 31% untuk belanja barang dan 30% untuk belanja modal dibandingkan dengan realisasi belanja semester pertama tahun 2019 (<https://djpb.kemenkeu.go.id>).

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya adalah perencanaan anggaran, waktu penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Darma (2014) sendiri menyatakan bahwa pemerintah daerah harus berperan lebih serius dalam upaya peningkatan daya serapan anggaran dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia. Perencanaan anggaran yang buruk akan tentu saja akan menjadi hambatan signifikan yang akan mencegah terjadinya peningkatan penyerapan anggaran.

Perencanaan anggaran sendiri dapat diartikan sebagai rancangan pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Permasalahan yang sering timbul dalam perencanaan anggaran adalah konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran sehingga berdampak kepada program kerja

yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, masalah lain yang terjadi dalam perencanaan adalah adanya anggapan anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui, sehingga mengusulkan anggaran yang lebih besar dari seharusnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil yang ada di lapangan (Seftianova, 2013).

Birokrasi adalah sebuah alat atau mekanisme yang dibuat untuk efisiensi dan kesuksesan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Eisenstadt, 1959). Dukungan lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Begitupun sebaliknya, tidak adanya dukungan dari lingkungan birokrasi yang baik akan menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan berdampak terhadap penyerapan anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada pemerintah daerah menarik minat beberapa peneliti untuk meneliti hal tersebut, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra, 2016) pada kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara menyatakan bahwa waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun lalu dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara simultan. Namun, secara parsial waktu penetapan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2011) menyebutkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam waktu penetapan APBD dengan batas waktu yang ditetapkan akan berpengaruh terhadap terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan atau program yang pada akhirnya akan menghambat daya serap anggaran APBD. Hasil penelitian yang dilakukan Juliani (2014) menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa diantaranya adalah pengetahuan peraturan, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramastyasa (2019) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan pengetahuan peraturan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini menggunakan teori stewardship yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani.

Tabel 1
Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
2017	Rp. 2.533.011.434.203	Rp. 2.277.054.473.014	89,89	Belum maksimal
2018	Rp. 2.482.420.455.403	Rp. 2.269.992.869.632	91,44	Belum maksimal
2019	Rp. 2.849.544.578.048	Rp. 2.690.070.098.038	94,40	Belum maksimal
2020	Rp. 2.802.866.187.358	Rp. 2.242.442.199.606	80,00	Belum maksimal

Sumber : <https://jdih.tanahdatar.go.id/perbup/index/140>

Berdasarkan Tabel 1 tentang ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Tanah Datar meningkat sebesar 1,55%, tahun 2019 meningkat sebesar 2,96%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 14,4%.

Penelitian ini merujuk penelitian Juliani & Sholihin (2014) mengenai pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu lingkungan birokrasi, pengetahuan peraturan dan komitmen manajemen.

Penelitian ini tentu saja berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, karena peneliti memilih tempat yang berbeda sebagai tempat penelitian. Peneliti selanjutnya juga mengeksplor faktor-faktor lain yang mungkin akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Faktor lain yang ditambahkan pada penelitian ini adalah perencanaan anggaran. Alasan peneliti menambahkan faktor-faktor tersebut adalah kedua faktor ini merupakan faktor penting dalam peningkatan penyerapan anggaran. Peneliti juga menambahkan kepala SKPD, bagian asset, bagian perencanaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagai responden pada penelitian ini karena pejabat tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran hingga realisasi anggaran, meskipun dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Selain itu penelitian tentang penyerapan anggaran di masa pandemi, khususnya di Sumatera Barat masih minim.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatera Barat Indonesia. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Disamping prestasi dan kelebihannya, terdapat banyak masalah yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah Sebagian besar daerah berada pada kawasan rawan bencana alam, sehingga memiliki resiko tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di kawasan tersebut, Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel) serta Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Stewardship Theory adalah penggambaran kondisi manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Seorang manajer dikondisikan sebagai pelayanan (*steward*) yang termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik (*principal*) dan manajer tidak akan meninggalkan organisasi sebab *steward* akan berusaha mencapai sasaran organisasi (Donaldson dan Davis, 1997). Pada teori ini seorang manajer dibentuk agar selalu bersedia melayani. Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar pengambilan keputusan seorang manajer.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya. Perencanaan merupakan proses yang dimulai dari menentukan tujuan organisasi, dengan cara menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh kemudian merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Robbins & Coulter, 2002).

Lingkungan Birokrasi

Birokrasi adalah mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Eisenstadt, 1959). Eisenstadt (1959)

menjelaskan bahwa birokrasi dipandang sebagai sebuah lambang rasionalitas dan implementasi yang efisien dari tujuan dan penyediaan layanan. Lingkungan birokrasi disini yang dimaksud adalah lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Lingkungan internal memberikan dampak yang terjadi dalam organisasi tersebut seperti hubungan antar karyawan, sosialisasi dan pengendalian internal organisasi. Kondisi internal organisasi ini dapat berganti dan berkembang tentunya di masa depan. Sedangkan lingkungan eksternal lebih berfokus kepada kondisi yang terjadi di luar organisasi yang diantaranya adalah pihak luar yang bekerjasama, kebijakan negara, pembaruan teknologi dan masyarakat (Matheus dan Sulistiyani, 2011 dalam Ikhsan, 2020).

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah tindak lanjut dari rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tertuang didalam APBN atau APBD (Simanjuntak, 2005). Penyerapan anggaran adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang dicapai oleh pemerintah dalam bentuk finansial. Mengukur daya serap anggaran bukan hanya sekedar membandingkan dana yang ada dengan pengeluaran yang sebenarnya, bahkan jika anggaran sudah dialokasikan 100% sekalipun mungkin terdapat kendala yang menyebabkan terjadinya relokasi dana atau kegagalan dalam melaksanakan rencana kerja.

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam kerangka teori *Stewardship* pihak *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi. *Principal* (pemberi amanah) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam hal ini *agent* harus melaporkan kepada *principal* mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan daya serap anggaran apakah serapan anggaran telah sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh perencanaan terhadap daya serap anggaran belum pernah dilakukan sebelumnya. Menurut Arif & Halim (2013) bahwa semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar tentunya. Semakin baik koordinasi dalam implementasinya akan semakin memudahkan pemegang amanah (*steward*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatuan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk suatu program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan, yang tentunya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemberi amanah harus sejalan dengan visi, misi organisasi dan pemberi amanah (*principal*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gagola *et al.*, (2016) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Juliani & Sholihin (2014) yang menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan birokrasi yang ada dalam pemerintahan akan menghasilkan ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Lingkungan Birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif, yang berarti penelitian ini merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana hubungan perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Datar. Metode pemilihan sampel yang peneliti digunakan adalah *purposive sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pegawai yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, penetapan maupun realisasi anggaran yaitu, Kepala badan/dinas, Bidang anggaran, Bidang aset dan Bendahara pengeluaran. Penelitian ini diukur menggunakan skala likert dalam setiap pengukuran variabelnya, yaitu penyerapan anggaran, perencanaan anggaran, dan lingkungan birokrasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yaitu berupa daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi dari responden. Kuesioner yang telah dibuat akan diantarkan langsung ke alamat responden. Kuesioner dibagikan sebanyak empat buah kepada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar. Untuk pengembalian kuesioner peneliti sendiri yang nantinya akan menjemputnya secara pribadi pada waktu yang telah ditentukan.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan *software SPSS*. Tahap-Tahap pengujian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : (1) uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) analisis statistik deskriptif, (3) pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, (4) analisis koefisien determinasi (R^2), (4) Uji F, dan (5) Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

		Statistics		
		Perencanaan Anggaran	Lingkungan Birokrasi	Penyerapan Anggaran
N	Valid	96	96	96
	Missing	0	0	0
Mean		25.36	29.81	39.98
Std. Error of Mean		0.301	0.361	0.409
Median		25	29	41
Std. Deviation		2.953	3.54	4.008
Minimum		16	21	31
Maximum		30	35	45

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021

Data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa jumlah data dari penelitian sebanyak 96 responden. Hasil uji di atas menunjukkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar

deviasi untuk setiap variabel. Dari hasil analisis data yang telah peneliti lakukan diatas, maka dapat diketahui bahwa :

- a. Dari data variabel perencanaan anggaran tersebut, dapat dilihat kita bahwa nilai rata-rata 25,36 dengan standar deviasi 2,95, sehingga dapat kita lihat bahwa standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran yang digunakan oleh penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata perencanaan anggaran kita lihat lebih mendekati nilai maksimum, sehingga nilai rata-rata perencanaan anggaran dalam sampel penelitian ini dikategorikan cukup tinggi
- b. Dari data lingkungan birokrasi tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 29,81 dengan standar deviasi 3,540, sehingga dapat dilihat bahwa standar deviasi variabel tersebut lebih kecil daripada nilai rata-rata itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa variabel lingkungan birokrasi yang digunakan oleh penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata lingkungan birokrasi lebih mendekati nilai maksimum, sehingga nilai rata-rata lingkungan birokrasi dalam sampel penelitian ini cukup tinggi.
- c. Dari data penyerapan anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 39,98 dengan standar deviasi 4,008, sehingga dapat dilihat bahwa standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menjelaskan bahwa variabel penyerapan anggaran yang digunakan oleh penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata penyerapan anggaran lebih mendekati nilai maksimum, sehingga nilai rata-rata penyerapan anggaran dalam sampel penelitian ini dinilai masuk dalam kategori cukup tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk menguji normalitas data penelitian. Suatu data dapat dikatakan normal apabila $\text{Sig.} \geq \alpha = 0,05$.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	2.73279629
Most Extreme Differences	Absolute	0.105
	Positive	0.105
	Negative	-0.061
Test Statistic		0.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c
Point Probability		0
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer diolah 2021

Pada hasil uji statistik non-parametrik kolmogorov smirnov diatas menyatakan bahwa Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,011 yang menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi ketidaknormalan data adalah dengan menggunakan pendekatan *exact*.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas setelah Menggunakan Metode Exact.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	2.73279629
Most Extreme Differences	Absolute	0.105
	Positive	0.105
	Negative	-0.061
Test Statistic		0.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		0.225
Point Probability		0
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer diolah 2021

Setelah peneliti melakukan uji normalitas dengan pendekatan Exact. Sig. (2-tailed), diperoleh hasil sebesar 0,225 sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, karena nilai Exact. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,225 > 0,05$). Sehingga hal ini memenuhi persyaratan untuk dilakukannya analisis regresi berganda, karena uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya (independen). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan VIF.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.571	2.866		3.688	0		
	perencanaan anggaran	0.676	0.106	0.498	6.36	0	0.816	1.225
	lingkungan birokrasi	0.412	0.089	0.364	4.647	0	0.816	1.225
a. Dependent Variable: penyerapan anggaran								

Sumber: Data primer diolah 2021

Penelitian ini menggunakan besaran *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan menggunakan alpha/tolerance kecil dari 10% (>10%) atau 0,10 dan VIF < 10. Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel yang ada bernilai $1,225 < 10$ dan semua *tolerance* variabel bebas sebesar $0,816 = 81,6\%$ yang mana diatas 10% atau 0,1, dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan nilai yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam penelitian ini, yang berarti tidak terjadi korelasi antara variabel bebas dengan variabel lainnya, yang dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi, sehingga tidak perlu dilakukannya standarisasi pada variabel tersebut dan tidak menganalisis kembali variabel bebasnya dan berdasarkan hasil tersebut dinyatakan memenuhi prasyarat untuk dilakukannya analisis regresi berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas, peneliti memilih menggunakan Uji Glejser, yang dilakukan dengan cara: Meregresi nilai absolut residual pada variabel independen. jika nilai signifikansi korelasi > 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi korelasi < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas Ghozali (2018).

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.171	1.779		2.345	0.021
	perencanaan anggaran	-0.039	0.066	-0.068	-0.598	0.551
	lingkungan birokrasi	-0.035	0.055	-0.073	-0.64	0.524

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil Tabel 6 tertera, Nilai signifikansi dari variabel independen perencanaan anggaran bernilai 0,551 dan lingkungan birokrasi sebesar 0,524 yang berarti memiliki nilai yang lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan uji pengaruh untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan Analisis Regresi Berganda. Adapun tujuan dilakukannya analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Analisis regresi berganda dapat dilakukan karena semua uji asumsi klasik telah memenuhi syarat.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.571	2.866		3.688	0.000
	perencanaan anggaran	0.676	0.106	0.498	6.36	0.000
	lingkungan birokrasi	0.412	0.089	0.364	4.647	0.000
a. Dependent Variable: penyerapan anggaran						

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Sehingga secara matematis peneliti dapat menulis hasil uji regresi berganda dalam bentuk persamaan berikut :

$$Y = 10,571 + (0,676) PA + 0,412 LB + e$$

Persamaan di atas menunjukkan pengaruh perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Arti dari koefisien regresi dari hasil perhitungan diatas adalah :

1) Konstanta (α)

Nilai konstanta dari persamaan ini adalah 10,571, yang menjelaskan bahwa tanpa pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi, maka nilai penyerapan anggaran sebagai variabel dependen adalah 10,571

2) Koefisien (beta) untuk variabel Perencanaan Anggaran

Nilai koefisien regresi perencanaan anggaran adalah 0,676. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel perencanaan anggaran meningkat satu satuan maka variabel penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 0,676 dengan asumsi variabel lain konstan.

3) Koefisien (beta) untuk variabel Lingkungan Birokrasi

Nilai koefisien regresi lingkungan birokrasi adalah 0,412. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lingkungan birokrasi meningkat satu satuan maka variabel penyerapan anggaran akan meningkat sebesar 0,412 dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilihat dari adjusted R square nya, dipilihnya adjusted R square karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 8
Uji Adjusted R2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.535	.525	2.762
a. Predictors: (Constant), lingkungan birokrasi, perencanaan anggaran				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan “*Model Summary*” pada Tabel 8, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah 0,535. Nilai R Square 0,535 ini adalah hasil pengkuadratan nilai koefisien “R” yaitu $0,731 \times 0,731 = 0,535$. Besar angka koefisien determinasi adalah sebesar 0,535 atau sama dengan 53,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel perencanaan anggaran (X1) dan lingkungan birokrasi (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel penyerapan anggaran sebesar 53,5%, sedangkan sisanya 57,5% (100%-53,5) lainnya ditentukan oleh faktor lain yang diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, juga untuk melihat apakah model yang digunakan signifikan atau tidak. Sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Uji Statistik F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	816.482	2	408.241	53.513	.000 ^b
	Residual	709.477	93	7.629		
	Total	1525.958	95			
a. Dependent Variable: PENYERAPAN_ANGGARAN						
b. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN_BIROKRASI, PERENCANAAN_ANGGARAN						

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 hasil analisis data yang diperoleh menguji hipotesis penelitian ini, maka dilakukan uji F dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pada level signifikansi 0,05, besar F tabel yang didapatkan dengan rumus $F(k;n-k)$ adalah 3,09. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 53,51$ dan signifikansi pada level 0,000. Jadi $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ yaitu $53,51 > 3,09$ dan nilai $\text{sig. } 0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel perencanaan anggaran, lingkungan birokrasi secara bersama-sama terhadap variabel penyerapan anggaran.

Uji Hipotesis (t-test)

Uji hipotesis atau disebut juga t-test ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya, yaitu pengaruh variabel perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Pengujian hipotesis secara parsial dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel yang ada. T tabel didapatkan dari rumus $t(\alpha/2;n-k-1)$.

Tabel 10
Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.571	2.866		3.688	0.000
	PERENCANAAN_ANGGARAN	0.676	0.106	0.498	6.36	0.000
	LINGKUNGAN_BIROKRASI	0.412	0.089	0.364	4.647	0.000

a. Dependent Variable: PENYERAPAN_ANGGARAN

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Jika nilai sig. < 0,05 atau t hitung lebih besar t tabel maka variabel independen tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana t tabel dengan n=96 dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,660. Arah pengaruh penelitian dapat dilihat berdasarkan nilai β (baca:Beta), jika nilai β bernilai positif berarti arah pengaruh hipotesis positif. Sebaliknya jika arah Beta bernilai negatif maka arah pengaruh hipotesis nantinya juga negatif. Berdasarkan hasil pengolahan uji statistik pada tabel tertera dapat ditarik kesimpulan:

- Perencanaan Anggaran (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 6,360 dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nilai β diperoleh sebesar 0,676 yang berarti arahnya positif, artinya perencanaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima.
- Lingkungan Birokrasi (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,647 dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nilai β diperoleh 0,412 yang berarti arahnya positif, dengan makna lingkungan birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian adalah perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dari Hasil uji statistik t untuk variabel perencanaan anggaran memiliki t hitung 6,360 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, Dalam kerangka teori *Stewardship* pihak *principal* dan *steward* memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan

organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi. *Principal* (pemberi amanah) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam hal ini *steward* harus melaporkan kepada *principal* mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan daya serap anggaran apakah serapan anggaran telah sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2016) tentang analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun anggaran 2018 dengan temuan faktor perencanaan anggaran merupakan faktor yang paling dominan dalam kecenderungan keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zarinah et al., (2016) dimana perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan SKPD. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anfuatin (2016) dan Mutmainna (2017) yang juga menyatakan bahwa faktor perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian Rifai (2016) dan Halim (2018) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hasil statistik t untuk variabel lingkungan birokrasi memiliki nilai t hitung 4,647 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Birokrasi merupakan sebuah mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Eisenstadt, 1959). Kondisi yang ada pada pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi (Eisenstadt, 1959). Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Semakin baik koordinasi dalam implementasinya antara penerima amanah (agen) dan pemberi amanah (prinsipal) akan semakin memudahkan pemegang amanah (agen) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di SKPD, sehingga diharapkan serapan anggaran dapat lebih cepat dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* karena lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Sebaliknya, jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan operasi, maka kegiatan operasional menjadi tidak lancar atau bahkan terhambat. Baiknya koordinasi dalam implementasinya antara penerima amanah (*steward*) dan pemberi amanah (*principal*) akan memudahkan pemegang amanah (*steward*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di SKPD, sehingga diharapkan serapan anggaran dapat lebih cepat dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliani dan Sholihin (2014). Juliani dan Sholihin (2014) yang memberikan hasil bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Lingkungan birokrasi mempengaruhi penyerapan anggaran karena adanya dukungan dan kondisi yang kondusif beserta keadaan di SKPD yang dapat mendukung penyerapan anggaran menjadi lebih baik. Penelitian yang

dilakukan Gagola et al., (2016) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradata (2019) lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Namun berbeda dengan penelitian Ikhsan (2020) yang menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya perencanaan anggaran akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Semakin baik dan matang perencanaan anggaran, maka program dan kegiatan dalam tahun anggaran akan berjalan dengan baik dan target penyerapan anggaran dapat tercapai.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya lingkungan birokrasi akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Semakin baik lingkungan birokrasi akan semakin mempermudah SKPD Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada sehingga diharapkan serapan anggaran dapat cepat dilakukan.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data pada penelitian ini didapat melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden tanpa adanya wawancara atau pertanyaan lisan. Selain itu, peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat seluruh pernyataan responden yang mengisi kuesioner penelitian untuk mengumpulkan data penelitian terhadap tingkat kejujuran responden, sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh responden mungkin tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Meskipun dalam pengisian angket sudah diupayakan secara teliti dan hati-hati, tentu saja hal tersebut juga tidak lepas dari kemungkinan adanya responden yang mengisi kuesioner dengan tidak serius dan asal-asalan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan dengan menambahkan wilayah dalam bentuk Provinsi atau gabungan beberapa kota/kabupaten.
2. Penelitian ini masih terbatas pada faktor perencanaan anggaran dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor baru diluar faktor yang digunakan pada penelitian ini.
3. Adanya kemungkinan kuesioner tidak diisi oleh pihak yang dituju sehingga tidak diperoleh hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Darma, R. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah*.
- Albrow, M. (1970). *Bureaucracy*. Pall Mall Press Ltd.

- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD. *Jurnal Administrasi Publik Universitas 17 Agustus Surabaya*.
- Angrina, R. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Journal Unp*, 5(2), 1–20.
- Arif, H., & Halim, A. (2013). aktor Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. In *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*. Universitas Indonesia.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta Review.
- Bramastyasa, G. P. (2019). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Birokrasi dan Pengetahuan Peraturan terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*. UNISSULA.
- Darma, R. (2014). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh*. Universitas Syiah Kuala.
- Eisenstadt, S. N. (1959). *Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucratization*. *Administrative Science Quarterly*. 4(3), 302–320.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & David, T. E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Erni Trisnawati, S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 53–64. researchgate.net
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi 2*.
- Hanif, I. (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 107–115.
- Ikhsan, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Komitmen Manajemen. Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/jasa*. Universitas Negeri Padang.
- Jensen, M dan Meckling, W. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure*.
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10>
- Lubis, R. (2019). *Serapan APBD 2019 Masih Rendah*.
- Ningtyas, W. P. M. (2020). *PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN*

BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.

- Putri, C. T., & Fachruzzaman. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja di Pemerintah Provinsi Bengkulu.*
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Ramdhani, D. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Pada Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–147.
- Ramdhani, Dadan, & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara /Lembaga. Jakarta: Republik Indonesia.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2002). *Manajemen*. Gramedia.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Seftianova, R. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada SATKER Wilayah KPPN Malang. *JRAK*, 4.
- Shah, R., & Fabozzi, 2007. (2007). *Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Public Sector and Governance and Accountability Series*. World Bank.
- Simanjuntak. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Universitas Indonesia.
- Subhan. (2011). *Pengaruh Corporate governance dan Leverage Keuangan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta.
- Surbakti, S. B. (2019). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara* [Universitas Sumatera Utara]. <https://www.usu.ac.id/id/fakultas.html>
- Sutaryo, O. C. (2014). Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. *SNA 17*.
- Suwarni, D. . (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi pada*

SKPD Dinas PU.

- Syahputra, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran dengan Perubahan Anggaran sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah kab/kota di Prov. Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi PascaSarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.